

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, dkk. 2020 “ Environmental Health-Based Post-Coal Mine Policy in East Akib Haedar dan Antonius Tarigan, Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan, *Implementasi Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Leo Agustino, 2008. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfa Beta.
- Lubis, Suwardi. 1987. *Metodologi Penelitian Sosial*. Medan: USU Prees
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- Muchsan, 1992. *Sistem Pengawasan Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty
- Muhajir, Noeng. 1996. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nasution, Muhammad Erfansyah. 2019. *Skripsi “Analisis Yuridis Pengalihan Izin Usaha Pertambangan terhadap Tindakan Akuisi Perusahaan Guna mewujudkan Kepastian Hukum dalam Berinvestasi”*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Pressindo.
- Primilono, Dwi & Zuhairi Ahmad, 2016 “Konsep Hukum Pertambangan Rakyat

- Pudiyatmo, Sri. 2007. *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*. Bandung: Rezki Press.
- Purwanto, dan Sulistyastuti. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke*
- Putrid, Nabila Desyaka dan Dian Agung Wicaksono. 2016. Implikasi Legislasi Pengambilan Kewenangan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Pusat, *Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 1*.
- Saleng, Abrar. 2009. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: Pustaka Yustitusia.
- Shiddieqy, Ash dan T.M Hasbi. 1990. *Pengantar Hukum Islam II*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Soekarto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik “Konsep, Teori, dan Aplikasi”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujanto. 1996. Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia. Jakarta: Galia Indonesia.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Wibawa, Samodra, dkk. 1994 Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 1994.
- Wicaksono, Muhammad Bagus Adi & Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi,
- Winardi. 1990. Asas-asas Manajemen. Bandung: Mandar Maju.

Winarno Budi, 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media

Skripsi

Yunda Rudita. 2018. Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan. Universitas Islam Negeri Sultansyarif Kasim Riau.

Website

“Regional Government Supervision on Coal Mine Voids in East Kalimantan Province”, *International Journal of Advanced Science and Technology*, Vol.29,No.04, hal 7168-7178, <http://serisc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/28125>, diakses 17 Januari 2024

Borneo”, *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, Vol.9, hal 740-744, <https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.6431>, diakses 17 Januari 2024

Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No.1, hal 179-191, <https://doi.org/10.29303/IUS.V4i1.421>, diakses 17 Januari 2024